

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak, namun jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tinggi. Hal tersebut menjadi suatu masalah yang belum dapat teratasi karena kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia (Kemenperin, 2017). Keynes berpendapat bahwa keseimbangan ekonomi bisa saja terjadi tanpa kesempatan kerja berada pada posisi *full employment*. Menurut Keynes kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah.

Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat yang sudah siap kerja menghadapi beberapa alternatif pilihan. Tenaga kerja baik yang berpengalaman atau *fresh graduate* akan tetap memilih bekerja walaupun dengan upah yang sangat jauh dari standar upah minimum regional yang telah ditentukan oleh pemerintah di masing-masing wilayah (Manggabarani & Triwahyuningtyas, 2019). Konsekuensinya jumlah pengangguran meningkat dan pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum. Produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan, sehingga tak jarang banyak dari para tenaga kerja terserap pada pekerjaan yang bersifat non formal dan tidak tetap. Permasalahan perluasan kesempatan kerja dalam pembangunan Indonesia selalu dikaitkan dengan masalah produktivitas pekerja (Malik, 2016).

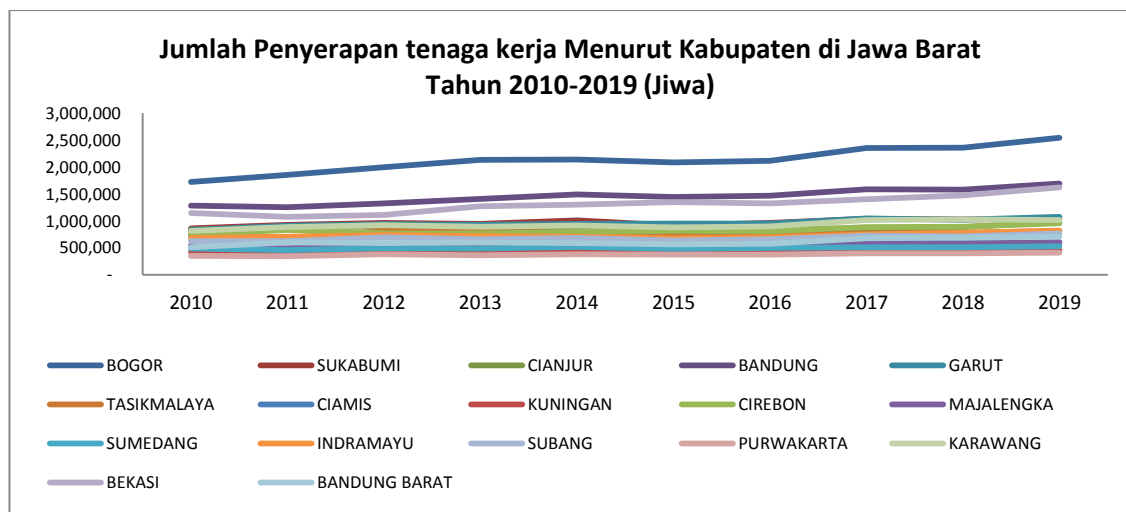
Peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi akan mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang terpenting dari tenaga kerja bukanlah dari segi kuantitas melainkan kualitas. Bila kualitas tenaga kerja lebih baik maka akan terjadi peningkatan produksi. Tenaga kerja itu sifatnya heterogen baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, kemampuan kerja, kesehatan, pendidikan, keahlian dan lain sebagainya, oleh karena itu diperlukan

perencanaan tenaga kerja guna mendukung pembangunan nasional Indonesia (*manpower planning*) (Indriani, 2016).

Sebagaimana daerah provinsi Jawa Barat yang masih memiliki masalah dalam penyerapan tenaga kerja. Daerah Jawa Barat masih belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada, karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja yang ada. Hal ini terlihat dari persentase penyerapan tenaga kerja antar pulau Jawa, Jawa Barat berada pada urutan kelima sebesar 91.96%, dengan urutan pertama diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 96.82%, dan urutan keenam diperoleh oleh Banten sebesar 91.89% (BPS, 2020). Padahal jumlah penduduk dan tingkat upah di Jawa Barat sudah termasuk tinggi, sehingga diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja yang ada (Prenggondani, 2016).

Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara berkelanjutan selama seminggu yang lalu. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah (Jolianis, 2012). Jumlah penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 1. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Sekurang – kurangnya 2 juta lapangan pekerjaan baru, dalam kurun waktu tahun 2010 – 2019 jumlah penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat relatif meningkat dengan jumlah angkatan kerja terbanyak sebesar 2.538.637 jiwa pada Kabupaten Bogor tahun 2019 dan jumlah penyerapan tenaga kerja terkecil diterima Kabupaten Purwarkarta pada tahun 2011 sebanyak 340.411 jiwa. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Purwarkarta disebabkan karena perusahaan – perusahaan merasa berat jika harus membayar upah minimum yang semakin tinggi, sehingga pada akhirnya perusahaan bonafit lebih banyak menggunakan teknologi dengan pemanfaatan tenaga robot yang menyebabkan aktivitas penyerapan tenaga kerja di daerah ini belum bisa memenuhi permintaan kerja dari masyarakat.

Tingginya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor disebabkan karena masih banyaknya yang bekerja pada sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor, bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak dalam menyerap tenaga kerja setelah sektor perdagangan, jika dibandingkan dengan sektor lain yang terdapat di Kabupaten Bogor sektor pertanian memiliki urutan ke dua dalam menyerap tenaga kerja.

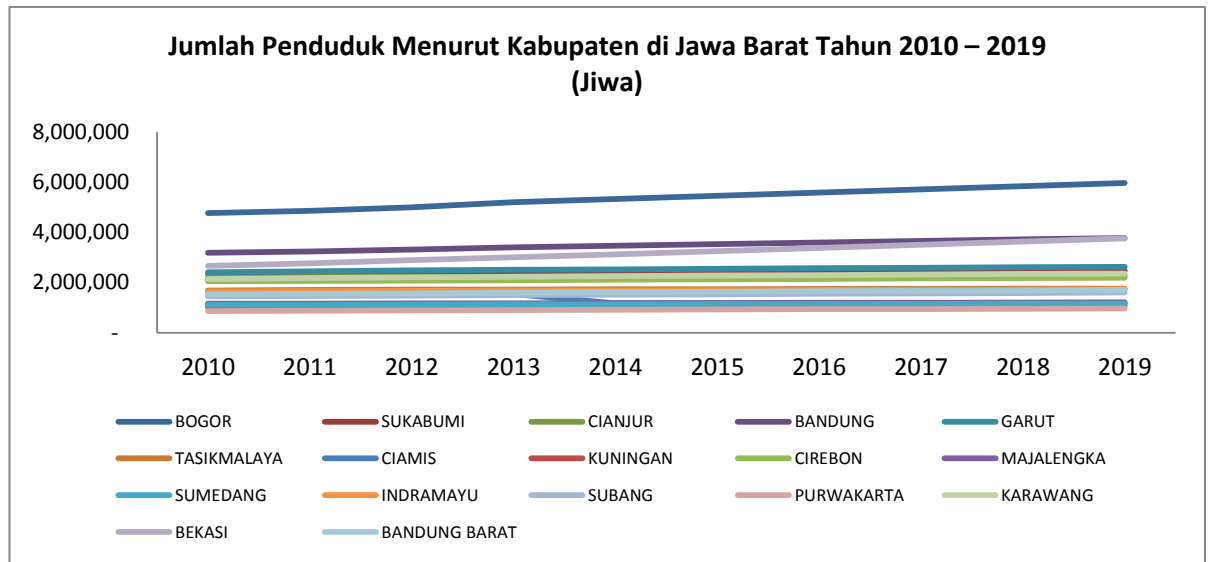
Jumlah penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat ternyata mengalami penurunan pada Kabupaten Ciamis di tahun 2015 yang disebabkan karena masih rendahnya pendidikan yang ditempuh penduduk Kabupaten Ciamis, yaitu dengan pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA). Hal tersebut yang membuat para penduduk sulit mendapatkan pekerjaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja yaitu faktor laju pertumbuhan penduduk, seperti halnya di provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan melalui *multiplier effect* karena adanya *aggregat demand* yang tinggi. Sebagai sumber tenaga kerja jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran, namun pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja akan mengakibatkan terjadinya masalah ketenagakerjaan seperti semakin tinggi angka

pengangguran yang dapat meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas dan fenomena sosial ekonomi di masyarakat (Khoirunnisa, 2020)

Jumlah penduduk yang relatif meningkat di Jawa Barat tahun 2010 – 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Jawa Barat**



*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020*

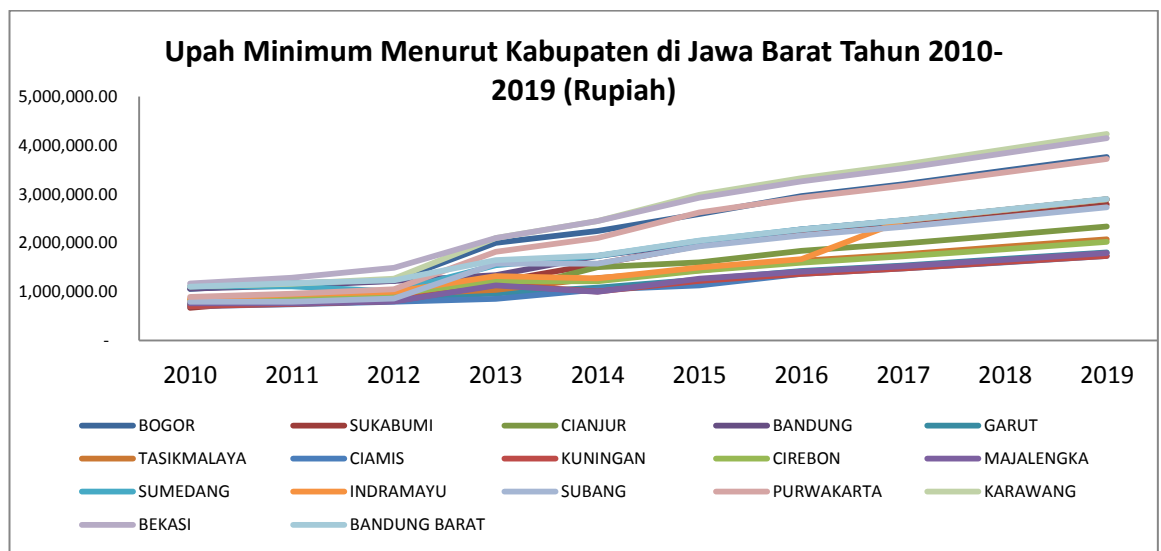
Pada periode tahun 2010-2019 jumlah penduduk Jawa Barat relatif meningkat dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor sebesar 5.965.410 juta jiwa yang disebabkan karena tingginya tingkat kelahiran bayi tiap tahunnya dengan rata – rata kelahiran 100 bayi per harinya. Pada 2014 jumlah penduduk Kabupaten Ciamis mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 1.162.102 juta jiwa yang disebabkan karena banyaknya penduduk yang mengikuti program keluarga berencana, dan di tahun yang sama tingkat kematian di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan.

Peningkatan penduduk secara terus – menerus ternyata tidak selalu mendukung penyerapan tenaga kerja, hal ini didukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan

yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur (Qodrunnada, 2017).

Faktor selanjutnya yang akan mempengaruhi tenaga kerja untuk bekerja adalah upah minimum. Upah juga menjadi faktor utama bagi para pencari kerja di provinsi Jawa Barat, dengan adanya upah akan meningkatkan semangat para pekerja dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi upah yang diberikan, maka para pekerja juga akan meningkatkan produktivitasnya dan produksi yang dihasilkan akan mencapai target (Priyono & Ismail, 2012).

**Grafik 3. Upah Minimum Menurut Kabupaten di Jawa Barat**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Kabupaten Bogor masih menjadi Kabupaten dengan upah tertinggi di antara yang lain, dengan jumlah upah tahun 2017 sebesar Rp 3.204.551,81 dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar Rp 3.763.405,88. Peningkatan upah minimum Kabupaten Bogor tahun 2019 sudah disesuaikan dengan perhitungan dari besarnya inflasi sebesar 3.39% ditambah besaran data pertumbuhan PDRB sebesar 5.12%. Pada tahun 2010 Kabupaten Sukabumi memiliki upah minimum terendah di Jawa Barat, yaitu sebesar Rp 671.500. atau naik berkisar 6.59% dari tahun sebelumnya, sedangkan dilihat dari jenis usaha, tercatat bahwa untuk industri susu suplemen/isonotik dan es krim menempati upah tertinggi dibanding sektor usaha lainnya.

Tingkat upah yang relatif meningkat seharusnya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di Jawa Barat. Menurut Keynes karyawan akan bergantung pada upah yang dibayarkan perusahaan, upah yang tinggi akan meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Peningkatan upah juga ditandai dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. Kenaikkan permintaan barang dan jasa akan menyebabkan produksi barang dan jasa perusahaan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah secara tidak langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja (Priyono & Ismail, 2012).

Hal ini tidak sesuai bagi prinsip perusahaan yang membayarkan upah, upah bagi perusahaan merupakan biaya produksi yang harus ditekan serendah – rendahnya supaya harga barang yang diproduksi tidak terlalu tinggi, sehingga keuntungan yang diperoleh tinggi (Asyhadie, 2017).

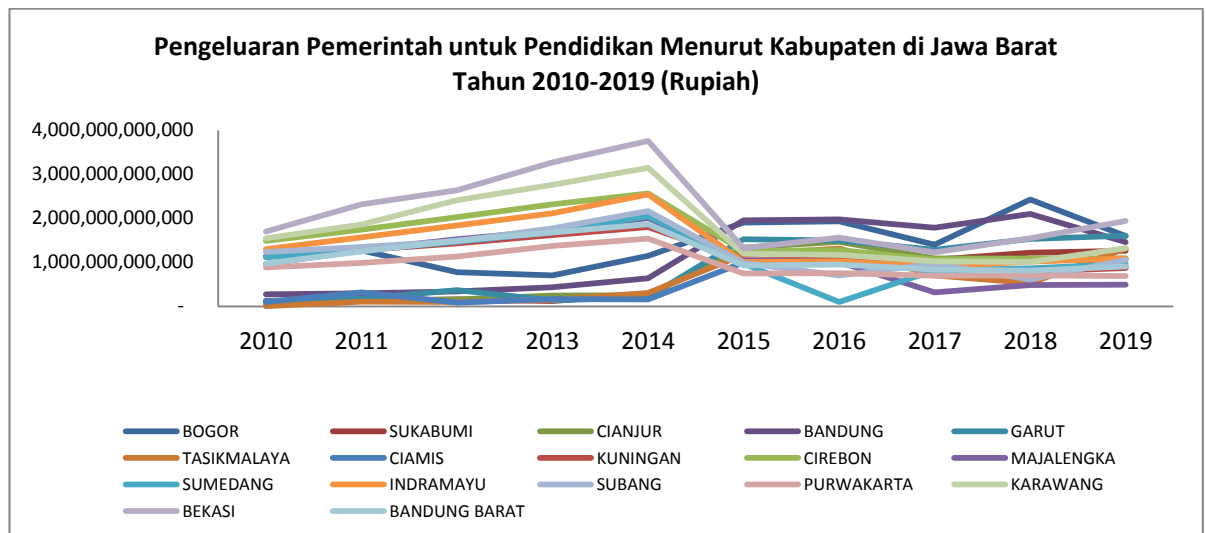
Peran pemerintah sangat besar untuk menentukan roda perekonomian, hal ini dapat dilihat dari besaran pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendidikan. Pemerintah sangat berhati-hati dan memperhitungkan betul dalam hal memperbesar pengeluaran pemerintah yang dikeluarkannya, sebab jika hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati maka akan terdapat pihak yang terkena imbas dari kebijakan yang dibuat pemerintah (Serang, 2017).

Pengeluaran untuk fungsi pendidikan ditujukan untuk pemerataan pendidikan bagi semua kalangan sehingga akan semakin banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan memiliki probabilitas lebih besar untuk memasuki pasar kerja sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Althofia & Agustina, 2015).

Alokasi belanja sektor pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 sebesar Rp11,38 triliun dengan tingkat penyerapan 97,010%. Alokasi belanja sektor pendidikan ini ditujukan pada program – program maupun output strategis di bidang pendidikan seperti Indonesia pintar, beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi sarana - prasarana pendidikan,

pengembangan dan pelatihan tenaga pendidik, serta tunjangan dan tambahan penghasilan bagi pengajar (guru dan dosen).

**Grafik 4 Total Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan di Jawa Barat**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan grafik 4 diatas, terlihat bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dari 2010-2019 terus berfluktuasi. Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten dengan total pengeluaran pendidikan terbesar, yaitu Rp 2,429,340,000,000 pada tahun 2018, lalu turun pada tahun 2019 sebesar 1.603.540.000.000 yang diakibatkan karena penurunan pendapatan keseluruhan di Kabupaten Bogor. Pengeluaran pendidikan terendah diterima oleh Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar Rp 7,440,915,000 pada tahun 2010. Rendahnya pengeluaran pendidikan di Kabupaten Ciamis disebabkan karena tidak terserapnya anggaran yang tersedia. Rendahnya keterserapan anggaran pendidikan disebabkan karena anggaran pada tahun 2010 lebih diprioritaskan pada upaya - upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan dan sektor lainnya yang rusak akibat bencana alam gempa bumi (Bappeda, 2014).

Menurut teori klasik Adam Smith tidak perlu adanya campur tangan pemerintah dalam setiap kegiatan perekonomian. Smith berpendapat bahwa adanya campur tangan pemerintah hanya merugikan dan membuat setiap individu kehilangan kebebasan dalam menentukan kegiatan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Keynes, yang menyatakan perlu adanya campur

tangan pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Campur tangan pemerintah ini dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa mengenyam pendidikan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik, salah satunya yaitu melalui pengeluaran pemerintah (Althofia & Agustina, 2015).

Pengeluaran pemerintah yang selama ini dikeluarkan pemerintah ternyata tidak mempercepat penyerapan tenaga kerja yang ditandai dengan masih rendahnya peningkatan produktivitas. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam pengalokasian pengeluarannya untuk sektor – sektor ekonomi yang masih potensial, dan pengeluaran pemerintah hendaknya lebih dioptimalkan untuk biaya pengembangan sumber daya manusia yang lebih merata serta menciptakan produktivitas yang dapat menyerap tenaga kerja (Ziyadaturrofiqoh et al., 2019).

Penulis tertarik mengambil tema ini karena jika dilihat dari data jumlah penduduk, tingkat upah, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di Jawa Barat sudah relative tinggi, namun tenaga kerja masih menjadi permasalahan di Jawa Barat. Adanya ketidaksesuaian antara teori dengan data yang ada. Teori Keynes mengatakan bahwa jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, namun pada data yang ada di tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Ciamis mengalami kenaikan, namun untuk jumlah penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tingkat upah juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dengan data, terlihat di tahun 2015 tingkat upah minimum Kabupaten Ciamis mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi keadaan tingkat penyerapan tenaga kerja menunjukkan hal sebaliknya. Tingkat penyerapan tenaga kerja Kabupaten Ciamis mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2014.

Penjelasan di atas didukung dengan adanya perbedaan pendapat antara penelitian yang dilakukan (Hartono et al., 2018) dengan judul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja yang memiliki hasil penelitian bahwa Upah Minimum Kota berpengaruh terhadap



Penyerapan Tenaga Kerja. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Pratiwi & Aisyah, 2019) menyatakan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan fenomena diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, UPAH MINIMUM, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA BARAT”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu kondisi adanya permintaan tenaga kerja yang tercermin dari tersedianya lapangan kerja sehingga penduduk yang bersedia dan mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dilihat dari persentase penyerapan tenaga kerja antar pulau Jawa, Jawa Barat masih berada pada urutan kelima sebesar 91.96%. Padahal Jawa Barat memiliki faktor pendukung yang dianggap dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, seperti jumlah penduduk atau tingkat upah yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh tingkat Upah Minimum Kabupaten Provinsi Jawa Barat terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat Upah Minimum Kabupaten terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

##### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh jumlah penduduk, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
- b. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya tentang pengaruh jumlah penduduk, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

##### **I.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah  
Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memperhatikan tingkat penduduk, standar upah minimum Kabupaten dalam penyerapan tenaga kerja.
- b. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta wawasan terhadap permasalahan penyerapan tenaga kerja.